

IMPLEMENTASI PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL (Studi Kasus di Kabupaten Sumenep)

Aisyah Putri Cahyani¹, Yaqub Cikusin², Taufiq Rahman Ilyas³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam
Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: aisyahputriicahyani@gmail.com*

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sumenep serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Metode yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan KIA di Sumenep masih belum merata, khususnya di daerah kepulauan, disebabkan oleh masalah komunikasi, kurangnya sumber daya, dan struktur pelayanan yang belum maksimal. Walaupun aparat pelaksana menunjukkan sikap positif dan terdapat inovasi seperti program Cendikia, tantangan geografis, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya fasilitas dan SDM di daerah terpencil tetap menjadi kendala utama. Analisis penelitian ini memanfaatkan teori implementasi George C. Edwards III yang menekankan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi saling berinteraksi dalam memengaruhi kesuksesan kebijakan pelayanan publik.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Kartu Identitas Anak, pelayanan publik,

Pendahuluan

Pelayanan publik adalah salah satu wujud nyata dari kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Hayat (2017:22) mengemukakan bahwa pelayanan publik mencakup berbagai kebutuhan fundamental masyarakat yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, pelayanan publik dapat dimaknai sebagai suatu sistem yang diorganisir oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kewajiban aparat pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat ditetapkan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik. Regulasi tersebut menguraikan bahwa pelayanan publik adalah kumpulan aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan warga negara dan penduduk akan barang, jasa, atau layanan administrasi.

Dalam pelaksanaan praktik, keberhasilan layanan publik tidak hanya ditentukan oleh dasar normatif, tetapi juga oleh keberhasilan pelaksanaan kebijakan. George C. Edwards III menyatakan bahwa ada empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut merupakan indikator krusial untuk mengevaluasi seberapa jauh

suatu program dapat sukses atau malah mengalami kegagalan (Taufiq et al., 2023).

Berdasarkan pengamatan awal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, pelayanan administrasi kependudukan mencakup penerbitan KTP, KIA, akta kelahiran, akta kematian, serta dokumen kependudukan yang lain. Layanan itu mencerminkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.

Dalam konteks administrasi kependudukan, wujud nyata pelayanan publik Hal ini tercermin melalui penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Program ini merupakan inovasi pemerintah dalam memperluas jangkauan layanan administrasi kependudukan bagi anak-anak sebagai subjek hukum yang selama ini kurang terakomodasi dalam sistem identitas resmi. Selain berfungsi sebagai identitas, KIA juga dirancang untuk memperkuat perlindungan terhadap anak melalui pemenuhan hak sipil dan akses terhadap layanan publik. Dengan demikian, program KIA menjadi bagian penting dalam inovasi pelayanan publik, khususnya yang menyasar kelompok rentan seperti anak-anak.

Program Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kebijakan nasional yang diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 dengan tujuan memperkuat administrasi kependudukan sekaligus

memberikan perlindungan terhadap hak anak. Menurut Bustomi dalam Riansyah (2022:2-3), KIA memiliki sejumlah manfaat, antara lain menjamin pemenuhan hak anak, mempermudah akses ke berbagai fasilitas umum, mencegah terjadinya perdagangan anak, menjadi identitas resmi saat menghadapi situasi darurat, serta memfasilitasi anak dalam memperoleh layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, imigrasi, perbankan, maupun transportasi.

Secara geografis, Kabupaten Sumenep terletak di bagian timur Pulau Madura yang terdiri dari 27 kecamatan, di mana 8 di antaranya merupakan daerah kepulauan. Luasnya wilayah yang terbagi dan kondisi topografi yang sulit mengakibatkan ketidakmerataan akses terhadap layanan publik, termasuk layanan administrasi kependudukan. Pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sumenep telah dimulai sejak tahun 2019. Berdasarkan data Disdukcapil hingga April tahun 2025, jumlah anak berusia 0–17 tahun mencapai 260.727 jiwa. Hingga tahun 2025, sebanyak 154.490 anak telah memiliki KIA, sementara 106.238 anak lainnya belum memiliki KIA. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep telah berhasil memenuhi target nasional, tetapi cakupan program masih belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah, terutama di daerah kepulauan dan terpencil.

Meskipun program Kartu Identitas Anak (KIA) memiliki peran strategis dalam perlindungan anak dan penataan administrasi kependudukan, pelaksanaannya di Kabupaten Sumenep masih menghadapi berbagai kendala di lapangan yang memengaruhi pemerataan capaian kepemilikan KIA. Tantangan pertama dalam pelaksanaan program KIA adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya dokumen identitas anak. Banyak orang tua masih menganggap KIA bukan kebutuhan mendesak karena belum menjadi syarat utama pada berbagai layanan administratif. Berdasarkan hasil pengamatan dan keterangan petugas, kesadaran masyarakat terhadap manfaat KIA masih rendah meskipun sosialisasi telah dilakukan.

Tantangan kedua adalah minimnya informasi dan edukasi mengenai prosedur pembuatan KIA. Banyak orang tua belum mengetahui syarat dan tahapan pengurusan, bahkan hanya mendapat informasi sekilas dari kerabat tanpa penjelasan resmi. Di beberapa desa juga belum tersedia media sosialisasi seperti banner, pamflet, atau penyuluhan, sehingga masyarakat kerap bingung terkait dokumen persyaratan, jadwal pelayanan keliling, maupun tata cara pengambilan KIA.

Tantangan ketiga adalah keterbatasan akses pelayanan, terutama di wilayah kepulauan dan pedesaan. Faktor geografis, infrastruktur yang terbatas, serta distribusi SDM menjadi kendala

utama. Alat cetak KIA hanya tersedia di kantor Disdukcapil (MPP), sehingga masyarakat kepulauan harus menunggu layanan keliling yang datang berkala. Kondisi ini menunjukkan akses yang terbatas berpotensi menghambat pemerataan pemenuhan hak identitas anak.

Program KIA memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan anak, karena berfungsi mencegah perdagangan manusia, eksploitasi, dan pernikahan dini, sekaligus memudahkan akses ke pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan perlindungan hukum. Dengan demikian, KIA mencerminkan prinsip inklusi sosial dan pengakuan negara terhadap setiap individu sejak dini. Di Kabupaten Sumenep, implementasi KIA memerlukan sinergi lintas sektor, meski faktanya koordinasi antarinstansi seperti sekolah, puskesmas, dan pemerintah desa belum berjalan optimal akibat kesenjangan pemahaman di tingkat pelaksana. Selain itu, kajian akademik mengenai implementasi KIA di wilayah kepulauan masih terbatas, karena penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada daerah perkotaan dengan akses memadai. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas di lapangan, khususnya di Sumenep yang memiliki karakteristik wilayah daratan dan kepulauan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis menetapkan judul penelitian: “Implementasi Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dirumuskan pada dua hal pokok, yaitu pertama mengenai bagaimana implementasi pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, serta kedua terkait faktor-faktor yang berperan sebagai pendukung maupun penghambat dalam implementasi pelayanan KIA di Kabupaten Sumenep?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk, pertama, mengetahui sekaligus menganalisis bagaimana proses implementasi pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sumenep, dan kedua, mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam implementasi pelayanan KIA di Kabupaten Sumenep.

Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian administrasi publik, khususnya terkait implementasi kebijakan pelayanan publik. Dari sisi

praktis, temuan penelitian dapat menjadi rekomendasi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan efektivitas program KIA. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis sebagai pengalaman akademik, sekaligus menjadi referensi bagi pembaca dalam memahami peran administrasi kependudukan sebagai instrumen perlindungan hak anak.

Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

1. Implementasi Kebijakan Program KIA di Kelurahan Krembangan Utara Kota Surabaya oleh Arsyilia Zhahral dan Lukman Arif. (2024)

Penelitian ini menerapkan teori George C. Edwards III dan menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan KIA di daerah tersebut sudah berjalan dengan baik, terutama dalam hal penyediaan fasilitas serta kolaborasi antar sektor. Namun, hasil penelitian juga mengungkap bahwa komunikasi dengan masyarakat belum sepenuhnya efektif, sumber daya manusia masih terbatas, dan struktur birokrasi belum berjalan maksimal. Masyarakat pun belum seluruhnya memahami pentingnya KIA karena masih menganggapnya sebagai dokumen tambahan yang belum wajib. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kualitas komunikasi, kapasitas pelaksana, dan dukungan struktural. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan dalam sosialisasi, pelatihan petugas, serta penyederhanaan birokrasi agar pelaksanaan kebijakan lebih tepat sasaran.

2. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Mojokerto oleh Al Annisa Nuraini Riskhoh Saputri. (2024)

Studi ini mengadopsi teori implementasi dari G. Edwards III dan David C. Korten, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan KIA di Kabupaten Mojokerto telah dilaksanakan, meskipun masih menemui berbagai hambatan. Penelitian menitikberatkan pada strategi komunikasi dan kegiatan sosialisasi, yang dalam praktiknya terkendala oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, kurang efektifnya penyampaian informasi, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai urgensi KIA. Meski demikian, program KIA dinilai berpotensi memperkuat pemenuhan hak-hak anak dalam administrasi kependudukan apabila didukung oleh komunikasi publik yang lebih optimal. Atas dasar itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas strategi komunikasi serta penguatan peran pelaksana lokal dalam memperluas akses layanan kepada masyarakat.

3. Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun oleh Ahmad Ridho Giovani. (2024).

Penelitian ini menggunakan teori David C. Korten dan menunjukkan bahwa implementasi program KIA masih belum optimal. Rendahnya kepemilikan KIA disebabkan oleh minimnya antusiasme masyarakat, kurangnya informasi dari pihak kelurahan, serta absennya sanksi atau kewajiban tegas terkait kepemilikan KIA. Meskipun prosedur pelayanan telah tersedia dan fasilitas memadai, manfaat KIA belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Hambatan lain muncul dari ketidaksesuaian antara target sasaran dan pelaksana, serta keterbatasan data terbaru mengenai anak yang belum memiliki akta kelahiran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas program dapat ditingkatkan melalui perbaikan strategi sosialisasi, pembaruan data kependudukan, serta penguatan peran pelaksana dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

4. Implementasi Program KIA dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kalijudan Kota Surabaya oleh Prana Lintang Gading Mayang Pandita. (2023).

Studi ini mengadopsi pendekatan Charles O. Jones dan meneliti pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) dalam konteks layanan administrasi kependudukan. Temuan studi menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah dilakukan dengan baik secara teknis, terlihat dari adanya SOP yang jelas, kesiapan sumber daya manusia, serta dukungan dari lembaga. Namun, kendala utama terletak pada kurangnya sosialisasi sehingga kesadaran masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pentingnya KIA masih rendah. Banyak warga belum memahami manfaat jangka panjang KIA, sehingga partisipasi belum maksimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun struktur pelayanan memadai, peningkatan komunikasi publik dan edukasi langsung kepada masyarakat tetap diperlukan agar program lebih diterima dan dimanfaatkan secara luas.

5. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang oleh Faishal Rafiif Thamrin. (2024).

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan KIA sebagai bagian dari program administrasi kependudukan bagi anak. Temuan riset menunjukkan bahwa implementasinya telah berlangsung cukup baik, terlihat dari adanya koordinasi antar lembaga dan tersedianya fasilitas penunjang. Namun, masih terdapat sejumlah kendala seperti rendahnya sosialisasi, kurang optimalnya peran pelaksana, serta persepsi masyarakat yang

menganggap KIA belum menjadi kebutuhan mendesak. Cakupan penerbitan KIA juga belum merata bagi seluruh anak usia 0–17 tahun karena keterbatasan tenaga pelaksana dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun KIA berkontribusi positif terhadap sistem pendataan anak, efektivitas program perlu ditingkatkan melalui penguatan SDM, perbaikan mekanisme pelayanan, dan peningkatan edukasi publik agar masyarakat memahami pentingnya kepemilikan KIA..

Kajian Teori

Menurut Wahab (1997:63) menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, aparatur pemerintah, dan kelompok masyarakat dari sektor publik maupun swasta, dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan..

Dalam konteks administrasi publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan strategis yang menghubungkan perumusan kebijakan dengan dampaknya terhadap masyarakat. George C. Edwards III (1980) menekankan bahwa kurangnya perhatian terhadap tahap implementasi sering kali menjadi penyebab utama kegagalan kebijakan, bahkan ketika kebijakan tersebut dirancang dengan baik.

Edwards mengidentifikasi empat faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi, yang mencakup kejelasan, konsistensi, serta ketepatan informasi yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan..
2. Sumber daya, meliputi kecukupan jumlah personel, kompetensi aparatur, fasilitas pendukung, serta kewenangan yang dimiliki.
3. Disposisi, yaitu perilaku, komitmen, dan penerimaan para pelaksana terhadap kebijakan, yang sering kali dipengaruhi oleh pandangan, nilai pribadi, maupun insentif yang diberikan.
4. Struktur birokrasi, yang berkaitan dengan mekanisme kerja internal maupun hubungan eksternal organisasi, yang dapat menjadi faktor pendukung ataupun penghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan.

Keunggulan model Edwards III terletak pada kemampuannya menyederhanakan kompleksitas proses implementasi menjadi empat komponen utama yang saling berinteraksi. Namun demikian, model ini belum sepenuhnya mengakomodasi pengaruh faktor eksternal non-birokratis seperti

dinamika politik, budaya lokal, atau tekanan publik yang juga berperan dalam keberhasilan kebijakan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam studi ini digunakan metode kualitatif, yakni pendekatan yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan tertulis maupun verbal dari informan serta perilaku yang diamati secara langsung. Strategi ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena dari sudut pandang subjek penelitian. Dalam penelitian deskriptif, tujuan utamanya adalah menggambarkan kondisi atau situasi objek secara keseluruhan sesuai dengan kenyataan yang ada saat penelitian dilakukan, lalu dianalisis dan dibandingkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

Metode kualitatif memberikan peluang bagi peneliti untuk memperoleh data lapangan yang faktual dan mendalam melalui keterlibatan langsung dalam proses pengumpulan informasi. Pendekatan ini bertujuan menghadirkan pemecahan terhadap suatu permasalahan dengan menyajikan informasi yang aktual, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus penerapannya dalam lingkup yang lebih luas. Dalam konteks ini, peneliti berfungsi sebagai alat utama yang mengatur proses pengumpulan dan analisis data sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2017).

Fokus Penelitian

Fokus penelitian berperan sebagai pembatas yang ditentukan oleh peneliti untuk memperjelas tujuan kajian dan menjaga agar ruang lingkup penelitian tetap terjaga serta tidak meluas pada isu-isu yang tidak relevan (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, perhatian utama difokuskan pada implementasi pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sumenep, dengan lokasi penelitian berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumenep sebagai lembaga yang melaksanakan program tersebut.

Dalam menganalisis penerapan kebijakan itu, penelitian ini menerapkan teori implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh George C. Edwards III. Berdasarkan teori ini, implementasi pelayanan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi, serta struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan.

Dengan menggunakan kerangka analisis tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai implementasi pelayanan KIA di Kabupaten Sumenep, sekaligus menelaah faktor-faktor

pendukung maupun yang menjadi hambatan dalam implementasinya.

Lokasi penelitian dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan sebagai sumber untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang telah dirumuskan (Moleong, 2017:127). Dalam penelitian ini, lokasi yang ditetapkan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumenep. Pemilihan tempat tersebut didasari oleh pertimbangan kemudahan akses serta kelengkapan informasi, mengingat Disdukcapil berfungsi sebagai instansi utama dalam pelaksanaan administrasi kependudukan yang memiliki data dan informasi yang relevan dengan penelitian. Dengan pemilihan lokasi ini, diharapkan peneliti bisa menginvestigasi informasi secara mendalam sambil mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Menurut Sugiyono (2017:215), situs penelitian adalah tempat di mana peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam studi ini, lokasi yang menjadi perhatian adalah unit implementasi pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di area Disdukcapil Kabupaten Sumenep. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fungsi strategisnya dalam mendukung terpenuhinya identitas dan perlindungan hak anak melalui layanan administrasi kependudukan.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ditetapkan dengan menerapkan teknik purposive sampling, yaitu metode penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2017:219). Dengan teknik ini, peneliti bisa menentukan informan atau data yang dianggap paling berhubungan dan mampu menyampaikan informasi mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Dalam studi ini, sumber informasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang didapatkan peneliti secara langsung dari responden atau subjek penelitian melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, serta dokumentasi di lapangan. Data ini bersifat orisinal karena diperoleh dari pengalaman, pandangan, dan informasi aktual yang diberikan oleh informan. Oleh karena itu, data primer dianggap memiliki tingkat validitas dan relevansi yang tinggi dalam menggambarkan realitas sosial yang diteliti. Penggunaan data primer memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang kontekstual dan mendalam

terhadap fenomena implementasi pelayanan KIA di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh peneliti, tetapi sudah ada dan dikumpulkan oleh orang lain. Data ini dapat meliputi literatur akademis, dokumen kebijakan, laporan resmi, jurnal, buku, serta data statistik yang berkaitan dengan fokus kajian.

Data ini berfungsi sebagai pelengkap dalam memberikan gambaran umum atau mendukung interpretasi terhadap data primer. Dalam penggunaannya, peneliti harus memastikan bahwa sumber-sumber sekunder tersebut relevan dan berasal dari referensi yang kredibel, agar dapat memperkuat analisis serta kesimpulan yang dihasilkan.

Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2017:224) menyatakan bahwa pengumpulan data adalah langkah krusial dalam penelitian karena esensi penelitian adalah mendapatkan data yang valid dan relevan. Apabila metode yang diterapkan tidak sesuai, maka data yang diperoleh berisiko tidak mencapai standar kualitas yang diinginkan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek penelitian, sambil mencatat berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan perilaku yang muncul di lapangan. Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, sehingga peneliti dapat mendapatkan data nyata mengenai praktik pelayanan yang terjadi.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan narasumber secara langsung. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyelami lebih dalam pandangan, persepsi, serta pengalaman narasumber terkait pelaksanaan pelayanan KIA. Selain itu, wawancara menciptakan interaksi timbal balik antara peneliti dan sumber informasi, sehingga data yang dikumpulkan menjadi lebih kaya, terperinci, dan kontekstual.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan informasi yang menggunakan arsip, catatan tertulis, serta dokumen lain

yang berhubungan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut bisa berupa laporan aktivitas, peraturan, data statistik, atau sumber-sumber tertulis lain yang diambil dari instansi tempat penelitian maupun dari sumber eksternal yang berhubungan. Metode ini berperan sebagai tambahan sekaligus penunjang temuan dari observasi dan wawancara, sehingga data yang didapat menjadi lebih tepat dan menyeluruh. Melalui penerapan ketiga teknik pengumpulan data tersebut, peneliti diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih utuh, valid, serta mendalam mengenai implementasi pelayanan KIA di Kabupaten Sumenep.

Instrumen Penelitian

Dalam studi kualitatif, peneliti berfungsi sebagai alat utama dalam proses pengumpulan informasi. Karena itu, peneliti harus memiliki pemahaman metodologis yang cukup, penguasaan atas substansi penelitian, serta kesiapan baik secara akademis maupun logistik. Nasution (di dalam Sugiyono, 2017) menegaskan bahwa manusia merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif karena memiliki kemampuan tinggi untuk beradaptasi dengan dinamika yang ada di lapangan. Di lapangan, peneliti mengumpulkan informasi menggunakan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Sebagai penunjang efektivitas pengumpulan data, juga digunakan instrumen tambahan seperti panduan wawancara terbuka serta alat dokumentasi berupa alat tulis, perekam suara, dan kamera (Afrizal, 2014)

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam studi ini dilakukan secara teratur seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2017), yang mencakup tahapan pengelompokan, penyederhanaan, dan interpretasi terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Model analisis yang diterapkan mengacu pada Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri dari empat tahap, yaitu:

1. Pengumpulan data, dilakukan baik sebelum maupun selama pelaksanaan penelitian;
2. Kondensasi data, yaitu proses memilih data yang relevan dengan memfokuskan pada informasi yang diteliti;
3. Penyajian data, dalam bentuk narasi atau visualisasi untuk memudahkan pemahaman; dan
4. Penarikan kesimpulan, dilakukan secara berkelanjutan disertai verifikasi data melalui triangulasi.

Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian kualitatif, diperlukan pengujian

kredibilitas. Salah satu metode yang diterapkan adalah triangulasi, yaitu usaha untuk mengecek data dengan memanfaatkan berbagai perspektif, baik dari sumber, metode, maupun waktu yang berbeda. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa ada tiga jenis triangulasi yang sering diterapkan, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diambil dari berbagai informan atau sumber yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menguji kesesuaian informasi yang disampaikan oleh para narasumber. Data yang telah dihimpun dari berbagai sumber selanjutnya dijelaskan, dikelompokkan, dan dianalisis dengan seksama. Pada tahap ini, peneliti juga dapat mengajukan pertanyaan tambahan untuk memastikan ketepatan dan keakuratan informasi yang diberikan oleh setiap informan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik bertujuan untuk menguji keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai cara pengumpulan data dari sumber yang sama. Contohnya, data yang diperoleh dari wawancara bisa dibandingkan dengan hasil observasi langsung serta dokumen yang terkait. Jika terdapat ketidakcocokan, peneliti akan melaksanakan investigasi tambahan untuk memastikan kebenaran informasi. Dengan begitu, langkah ini memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif tentang fenomena yang diteliti.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan menguji data melalui pengumpulan informasi pada waktu yang berlainan untuk memastikan konsistensinya. Faktor waktu berpengaruh pada kualitas jawaban yang diberikan oleh informan, contohnya wawancara di pagi hari biasanya menghasilkan respons yang lebih jelas karena kondisi fisik dan mental informan masih segar. Dengan demikian, data yang sudah diperoleh akan diuji lagi dengan pengulangan di waktu yang berbeda. Jika ada perbedaan hasil, peneliti harus melakukan klarifikasi lebih lanjut sampai memperoleh data yang benar-benar mencerminkan situasi yang sebenarnya.

Pada penelitian ini, triangulasi diterapkan kepada semua informan yang terlibat dalam pelaksanaan layanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sumenep. Informasi yang didapat dari lapangan selanjutnya disusun dan dikelompokkan ke dalam kategori tertentu, sehingga lebih mudah untuk dianalisis dan menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian.

Pembahasan

1. Analisis Implementasi Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sumenep

Analisis implementasi pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sumenep mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang menyoroti empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Disdukcapil Sumenep telah menerapkan berbagai strategi, seperti pelayanan langsung di kantor, layanan jemput bola ke sekolah dan desa, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan. Inovasi juga dilakukan melalui pemanfaatan media digital untuk menjangkau masyarakat yang memiliki akses informasi lebih baik. Namun, tantangan masih ditemukan, terutama di wilayah kepulauan dan desa terpencil yang menghadapi hambatan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan minimnya pemahaman masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi, distribusi sumber daya, dan pengelolaan birokrasi belum sepenuhnya optimal. Pembahasan ini bertujuan untuk menelaah pelaksanaan pelayanan KIA berdasarkan keempat variabel dalam teori Edwards III.

1. Komunikasi

George C. Edwards III mengungkapkan bahwa komunikasi merupakan salah satu elemen penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, mencakup kejelasan pesan, konsistensi informasi, serta pemahaman dari pihak yang melaksanakan dan pihak yang mendapatkan manfaat. Di Sumenep, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggunakan berbagai strategi komunikasi, seperti pemanfaatan media sosial, pelaksanaan layanan jemput bola, serta menjalin kemitraan dengan sekolah dan pemerintah desa.

Strategi ini cukup efektif menjangkau masyarakat di wilayah perkotaan dan sekolah-sekolah yang memiliki akses informasi digital. Namun, hambatan masih ditemui di wilayah kepulauan dan desa-desa terpencil akibat keterbatasan infrastruktur komunikasi. Akibatnya, sebagian masyarakat belum memperoleh informasi yang memadai mengenai program KIA.

Kondisi ini selaras dengan temuan di daerah lain, seperti penelitian Thamrin (2023) di Semarang dan Giovani (2024) di Karimun, yang menunjukkan bahwa minimnya sosialisasi dan keterbatasan informasi menjadi faktor penghambat kepemilikan KIA. Kesenjangan informasi menyebabkan sebagian masyarakat tidak memahami urgensi

KIA meskipun prosedur pengurusannya mudah.

Oleh karena itu, Disdukcapil perlu memperkuat strategi komunikasi yang berbasis komunitas, melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan tenaga pendidik sebagai mitra penyebar informasi. Pemetaan wilayah yang belum terjangkau juga penting agar strategi yang disusun lebih tepat sasaran. Dengan demikian, komunikasi dapat berfungsi sebagai penghubung efektif antara kebijakan, pelaksana, dan masyarakat, sesuai dengan kerangka teori Edwards III.

2. Sumber Daya

George C. Edwards III menyatakan bahwa keberhasilan dalam implementasi kebijakan sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, dan akses terhadap informasi. Dalam pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sumenep, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) telah menyediakan beragam fasilitas pendukung di pusat layanan, salah satunya di Mal Pelayanan Publik (MPP). Fasilitas itu mencakup komputer, printer, jaringan informasi, dan staf terlatih, sehingga dapat mendukung kelancaran layanan, terutama di area pusat kota.

Namun demikian, distribusi sumber daya masih timpang. Wilayah kecamatan dan kepulauan banyak yang belum memiliki fasilitas cetak KIA dan tenaga pelayanan yang memadai, sehingga masyarakat harus menempuh jarak jauh atau menunggu jadwal pelayanan keliling yang terbatas. Penelitian Pandita (2023) di Surabaya menyoroti pentingnya SDM dan sistem digital sebagai pendukung layanan, sedangkan di Sumenep tantangan utamanya adalah keterbatasan sarana dan SDM di luar pusat kota.

Keterbatasan tersebut menyebabkan akses pelayanan belum merata, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Kondisi ini sekaligus menguatkan pandangan Edwards III bahwa tanpa adanya distribusi sumber daya yang proporsional, kebijakan yang dirancang dengan baik pun tidak akan dapat diimplementasikan secara optimal.

Sebagai solusi, Disdukcapil perlu pemeratakan fasilitas pelayanan hingga tingkat kecamatan, memperluas armada pelayanan keliling, serta memberdayakan sekolah dan pemerintah desa sebagai mitra. Peningkatan kapasitas petugas dan pemantauan partisipatif juga penting agar pelayanan lebih responsif terhadap kondisi sosial dan geografis masyarakat. Dengan demikian, pelayanan KIA dapat menjangkau seluruh sasaran secara inklusi.

3. Disposisi

Dalam kerangka teori George C. Edwards III, disposisi yang meliputi sikap, komitmen, dan kemauan dari para pelaksana merupakan elemen penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur Disdukcapil Kabupaten Sumenep yang menangani pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) memiliki disposisi yang positif, terlihat dari sikap ramah, sabar, komunikatif, serta kesungguhan dalam memberikan penjelasan prosedur kepada masyarakat. Profesionalitas ini berkontribusi dalam membangun kepercayaan publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Saputri (2024) di Mojokerto, Thamrin (2023) di Semarang, serta Giovani (2024) di Karimun yang sama-sama menegaskan bahwa disposisi pelaksana memiliki peran sentral dalam efektivitas implementasi kebijakan.

Selain sikap individu, disposisi kelembagaan juga diperkuat melalui penerapan SOP dan pengawasan internal, yang memastikan disiplin kerja dan koordinasi. Namun, keterbatasan jangkauan layanan membuat kualitas disposisi ini belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil.

Oleh karena itu, penguatan disposisi perlu diimbangi dengan pelatihan, rotasi, dan mobilisasi petugas agar kehadiran pelayanan yang humanis dapat dirasakan secara merata. Dengan disposisi pelaksana yang kuat dan terdistribusi, kebijakan KIA dapat diimplementasikan secara efektif sesuai kerangka Edwards III.

4. Struktur Birokrasi

George Edwards III berpendapat bahwa adanya struktur birokrasi yang teratur dan terkoordinasi sangat penting untuk menjamin pelaksanaan kebijakan berlangsung dengan tertib dan efisien. Dalam pelaksanaan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sumenep, Disdukcapil telah menyusun struktur organisasi dengan pembagian tugas yang tegas melalui unit kerja serta penerapan standar operasional prosedur (SOP). Sistem ini terbukti efektif, terutama di pusat layanan seperti Mall Pelayanan Publik (MPP), di mana proses pelayanan berjalan dengan teratur, rapi, dan transparan.

Namun demikian, struktur birokrasi ini belum merata di seluruh wilayah, terutama di kecamatan dan kepulauan. Fasilitas cetak KIA dan kehadiran petugas masih terpusat di kota, sehingga warga di

desa terpencil harus menempuh jarak jauh atau bergantung pada layanan kolektif melalui sekolah, yang sering kurang transparan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Thamrin (2023), Giovani (2024), dan Lintang (2023) yang menyoroti lemahnya struktur pelayanan di tingkat kelurahan atau desa akibat kurangnya koordinasi dan sarana.

Merujuk pada Edwards III, struktur birokrasi harus adaptif terhadap kondisi geografis yang beragam. Oleh karena itu, Disdukcapil perlu memperkuat unit layanan di kecamatan, menambah sarana cetak KIA, memperluas pelayanan keliling, serta menjalin kerja sama dengan desa untuk mendekatkan layanan ke masyarakat. Pendekatan digital dan pembentukan unit layanan mandiri juga dapat menjadi solusi untuk menjangkau wilayah terpencil secara berkelanjutan.

Dengan struktur birokrasi yang lebih fleksibel dan merata, implementasi program KIA di Sumenep diharapkan semakin inklusif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip efektivitas implementasi kebijakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkap bahwa keempat variabel dalam teori implementasi George Edwards III yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berperan secara saling berkaitan serta mendukung dalam menentukan implementasi pelayanan KIA di Kabupaten Sumenep. Penyebaran informasi yang belum merata berdampak pada pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama dalam operasional pelayanan, disposisi positif aparaturnya masih membutuhkan penguatan melalui strategi mobilisasi, sementara struktur birokrasi memerlukan peningkatan koordinasi antarwilayah untuk mengatasi hambatan geografis. Oleh karena itu, penentuan strategi implementasi pelayanan publik di daerah kepulauan seperti Sumenep harus mempertimbangkan secara komprehensif aspek geografis, sosial, dan kultural agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan berkelanjutan.

2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pelayanan KIA di Kabupaten Sumenep

Dalam implementasi kebijakan publik, keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada konten kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang dapat berperan sebagai pendorong maupun penghalang di lapangan. Hasil penelitian di Kabupaten Sumenep mengungkapkan sejumlah faktor yang menjadi pendukung serta tantangan dalam memengaruhi efektivitas layanan Kartu

Identitas Anak (KIA). Faktor-faktor itu saling berhubungan dan mempengaruhi sejauh mana layanan dapat dioptimalkan, terutama di daerah yang memiliki kondisi geografis dan sosial yang rumit.

1. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Program

Keberhasilan implementasi kebijakan pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh faktor internal organisasi seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dijelaskan dalam teori George Edwards III melainkan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang bersifat kontekstual. Dalam konteks pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sumenep, penelitian ini menemukan sejumlah faktor pendukung yang berperan penting dalam mendorong efektivitas pelaksanaannya.

Pertama, adanya inovasi kelembagaan melalui Program Cendikia yang mengoptimalkan peran sekolah sebagai mitra layanan kolektif. Pendekatan ini mempermudah akses masyarakat di wilayah kepulauan yang jauh dari pusat layanan. Kedua, kesiapan sarana dan prasarana di pusat layanan seperti Mall Pelayanan Publik (MPP) mendukung kelancaran proses pelayanan. Ketiga, kerja sama lintas sektor dengan sekolah, perangkat desa, dan tokoh masyarakat memperkuat jangkauan layanan hingga ke komunitas. Keempat, strategi komunikasi digital melalui media sosial dan grup WhatsApp sekolah terbukti efektif meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Thamrin (2023), Giovani (2024), dan Zhahral & Arif (2024) yang menegaskan pentingnya inovasi, kerja sama lintas sektor, dan komunikasi aktif sebagai faktor pendukung implementasi KIA. Dengan demikian, praktik di Sumenep menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan menuntut sinergi antara kesiapan internal dan kolaborasi eksternal, sehingga pelayanan publik menjadi lebih inklusif, adaptif, dan kontekstual dengan tantangan geografis daerah.

2. Faktor-Faktor Penghambat dan Tantangan Implementasi

Implementasi pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sumenep mencatat kemajuan melalui inovasi kelembagaan dan kerja sama lintas sektor, namun masih menghadapi

hambatan signifikan. Berdasarkan teori George Edwards III, hambatan ini terkait erat dengan aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi.

Pertama, tantangan akses geografis menjadi kendala utama mengingat Sumenep memiliki wilayah daratan dan kepulauan dengan infrastruktur transportasi terbatas. Pelayanan masih terpusat di kantor Disdukcapil, sementara layanan keliling belum menjangkau pulau terpencil secara rutin. Kedua, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KIA menunjukkan komunikasi kebijakan belum menjangkau komunitas yang tidak terhubung digital. Ketiga, keterbatasan sarana dan tenaga pelaksana membuat distribusi layanan belum merata, memaksa warga desa untuk mengakses kantor pusat atau menunggu jadwal layanan keliling.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Giovani (2024), Thamrin (2023), dan Al Annisa (2024) yang menyoroti lemahnya komunikasi kebijakan dan distribusi sumber daya di berbagai daerah. Oleh karena itu, Disdukcapil perlu menguatkan unit layanan bergerak, mendorong digitalisasi desa, membangun kerja sama lintas aktor lokal, dan memperluas strategi komunikasi berbasis komunitas.

Selain itu, peningkatan disposisi pelaksana melalui pelatihan dan supervisi rutin juga diperlukan agar petugas memiliki kompetensi teknis dan sikap pelayanan yang responsif. Dengan kebijakan yang adaptif, komunikasi efektif, distribusi sumber daya yang adil, dan struktur birokrasi yang fleksibel, implementasi program KIA di Sumenep diharapkan berjalan lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sumenep mencapai kemajuan berkat inovasi kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, dan strategi proaktif. Namun, pelaksanaannya masih terkendala aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagaimana teori George C. Edwards III. Komunikasi belum merata ke wilayah kepulauan, sumber daya dan SDM masih terbatas di kecamatan dan desa, mobilisasi petugas ke daerah terpencil belum optimal, serta koordinasi lintas unit belum maksimal. Di sisi lain, program

ini didukung oleh inovasi layanan seperti program Cendikia, kolaborasi dengan sekolah dan desa, pemanfaatan teknologi informasi, serta komitmen pemerintah daerah. Meski demikian, tantangan geografis kepulauan dan rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama, sehingga diperlukan strategi adaptif untuk menjamin pemerataan layanan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Saran

Mengacu pada kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Komunikasi: Sosialisasi berbasis komunitas dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, guru, dan kader PKK menggunakan bahasa lokal.
2. Sumber daya: Menambahkan alat cetak di kecamatan, armada keliling, dan pelatihan teknis berkelanjutan.
3. Disposisi: Meningkatkan etika pelayanan, lakukan supervisi rutin, dan rotasi petugas.
4. Struktur birokrasi: Memperkuat koordinasi lintas unit, layanan berbasis desa/sekolah, serta digitalisasi administrasi.
5. Rekomendasi Kebijakan: Menyusun regulasi pendukung (Peraturan Bupati atau Surat Edaran) agar KIA menjadi syarat pelayanan publik, seperti layanan pendidikan dan kesehatan.
6. Penelitian selanjutnya: Mengkaji perilaku masyarakat, hambatan di wilayah kepulauan, efektivitas digitalisasi, serta perbandingan dengan daerah lain.

Dengan demikian, diharapkan implementasi program KIA di Kabupaten Sumenep dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan menjangkau seluruh anak sesuai tujuan perlindungan identitas hukum anak Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ayuningtyas, D. (2014). *Pengantar Administrasi dan Kebijakan Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. 2018. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Press.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan*

Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.

- Harbani Pasolong. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hayat, M. (2017). *Pelayanan Publik dalam Perspektif Administrasi*. Malang: Literasi Nusantara.
- Ibrahim, R. (2008). *Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moenir, H. A. S. (2005). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Ridwan & Sudrajat. (2009). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: CV. Kencana.
- Saleh, S. (2023). *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Sulawesi Selatan: Agma.
- Sampara, M. (1999). *Manajemen Pelayanan Publik*. Makassar: Unhas Press.
- Sinambela, L. P. (2013). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solichin, A. (2001). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1974). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework". *Administration and Society*, 6(4), 445–488.
- Wahab, S. A. (1997). *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- ### Jurnal atau Artikel
- Anggraini, F., Ati, N., Ilyas, T. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi tentang Objek Wisata Jamun Spot Sunset Desa Poncokusumo Kabupaten Malang). *Respon Publik* 17 (6), 39-49
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep. (2024). *Kabupaten Sumenep dalam Angka 2024*. Sumenep: BPS.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. (2022). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022*.

- Giovani, dkk. Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, vol. 1, no. 1, 2024, pp. 296–306. DOI.org (Crossref), Jan. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i1.34>.
- Humaira, G. A. (2024). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai Upaya Pemenuhan Hak bagi Anak di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Civic Hukum*, 9(1), 65–78. <https://doi.org/10.30997/jch.v9i1.234>.
- Media Jatim. (2025, 17 Maret). “96.111 Anak di Sumenep Belum Memiliki KIA”. Diakses pada tanggal 15 April 2025 dari: <https://mediajatim.com>.
- Pandita, P, dan Vidya, I. Implementasi Program Kartu Identitas Anak Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kalijudan Kota Surabaya. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, vol. 6, no. 2, 2023, pp. 241–48. ojs.stiami.ac.id, <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3455>.
- Riansyah, H. (2022). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur [Skripsi]. <http://eprints.ipdn.ac.id/8133/1/RINGKASAN%20SKRIPSI%20PRAJA%20HARI%20RIANSYAH%2029.1124%20B3.pdf>.
- Ristiani, I. 2020. Manajemen Pelayanan Publik Pada Mall Pelayanan Publik Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, vol. 11, no. 2, Juli 2020, pp. 165–78. journal.ikopin.ac.id, <https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i2.116>.
- Saputri., dkk. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Di Kabupaten Mojokerto. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, vol. 1, no. 3, Juni 2024, pp. 192-97. DOI.org (Crossref) <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i3.473>.
- Thamrin, F., Santoso, R., Warsono, H. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, vol. 12, No 4, 29 September 2023, pp. 394–412. ejournal3.undip.ac.id, <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i4.41299>.
- Van Meter, Donald S., dan Carl E. Van Horn. “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework.” *Administration & Society*, vol. 6, no. 4, Feb. 1975, pp. 445–88. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>.
- Zhahral, A, dan Lukman, A. Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kelurahan Krembangan Utara Kota Surabaya. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, vol. 4, no. 2, Apr. 2024, pp. 530–42. journal-laaroiba.com, <https://doi.org/10.47467/visa.v4i2.1625>.
- Undang-Undang**
Kementerian Dalam Negeri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Jakarta: Kemendagri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik..